

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	i
SAMPUL DALAM	ii
PRASYARAT GELAR	iii
PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTO	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR ISTILAH	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRAK	xviii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.4 Ruang Lingkup Penelitian	8
1.5 Kerangka Konseptual dan Landasan Teori	9
1.6 Tinjauan Pustaka	10
1.7 Metode dan Sumber Penelitian	14
1.8 Sistematika Penulisan	17
BAB II	19
KONDISI HUTAN JATI BOJONEGORO	19
2.1 Geografis dan Ekologis Kabupaten Bojonegoro	20

2.2	Sistem Kehutanan.....	24
2.3	Masyarakat di Sekitar Hutan Jati	28
BAB III		31
STRUKTUR KEBIJAKAN PENGELOLAAN HUTAN JATI.....		31
3.1	Penguasaan Hutan Jati	32
3.2	Rekrutmen Pengawas dan Pekerja Hutan	38
3.2.1	Sebelum abad XIX	38
3.2.2	Periode 1808-1830	40
3.2.3	Periode 1830-1874	44
3.3	Sistem Penebangan dan Pembagian Wilayah Hutan	53
BAB IV		62
USAHA EKONOMI DAN DAMPAK PENGELOLAAN HUTAN JATI BOJONEGORO		62
4.1	Upah Kerja	63
4.2	Reboisasi Lahan	66
4.3	Pelaksanaan Kerja Blandong oleh Perusahaan Swasta	71
4.3.1	Masuknya Perusahaan Swasta dalam kegiatan Eksploitasi	73
4.3.2	Kontrak dan Lelang Wilayah Penebangan Hutan	75
4.4	Dampak kerja wajib Blandong.....	79
4.4.1	Bidang Pertanian	79
4.4.2	Kecelakaan Pekerja Blandong dan Hewan Ternak	82
4.4.3	Konflik Sosial	84
BAB V		88
SIMPULAN		88
DAFTAR PUSTAKA.....		91
LAMPIRAN.....		94

DAFTAR TABEL

2.1. Distribusi Orang Kalang di Bojonegoro.....	30
3.1. Jumlah <i>Blandong</i> pada distrik di Karesidenan Rembang tahun 1840	47
3.2. Jumlah Tenaga Blandong di Rembang tahun 1865	51
3.3. Luas Hutan Negara Rembang (dalam Km ²).....	54
3.4. Hasil penebangan Kayu Jati tahun 1838-1840	56
3.5. Hasil penebangan Kayu Jati tahun 1841-1843	56
4.1. Luas (ha) Peremajaan Alami dan Buatan Hutan Jati di Wilayah Kabupaten Bojonegoro	71
4.2. Kegagalan Panen Tahun 1856	80
4.3. Jumlah Uang Ganti Rugi (dalam Gulden).....	83
4.4. Jenis Kriminalitas di Rembang Tahun 1816.....	84

DAFTAR GAMBAR

2.1. Gambar 2.1. Aliran Sungai Bengawan Solo di Bojonegoro.....	22
2.2. Gambar 2.2. Persebaran Hutan Jati di Wilayah Dander.....	23
4.1. Gambar 4.1. Hutan Jati Hasil Peremajaan, usia 16 bulan (tinggi 6,60 meter)	69
4.2 Gambar 4.2. Hutan Jati Hasil Peremajaan, usia 4,5 tahun	69
4.3 Gambar 4.3. Kegiatan Penebangan Hutan oleh Perusahaan Swasta.....	72

DAFTAR ISTILAH

- Blandong* : Pekerja hutan/Penebang kayu di hutan
- Boschganger* : Pejabat kehutanan setingkat *Sinder*
- Houtvester* : Kepala bagian wilayah hutan yang direncanakan (pemerintah Belanda)
- Mandor* : Kepala buruh hutan, jenjang terendah dalam birokrasi kehutanan; menyelia blandong, buruh reforestrasi/reboisasi, penyedap getah; sering merangkap sebagai polisi hutan
- Opziener* : Pengawas yang biasanya dari pribumi
- Paal* : Ukuran panjang setara 1.506 meter
- Persil* : Petak tanah
- Orang Kalang : Pekerja Blandong yang ulung
- Sinder* : Kepala Bagian Kesatuan Pemangkuan Tanah

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Peta wilayah hutan pada beberapa kecamatan di Bojonegoro .	93
Lampiran 2. Proses Pengangkutan Kayu Jati Hasil Penebangan.....	101
Lampiran 3. Dampak Kerja Wajib Blandong	102
Lampiran 4. Pembagian Personil untuk Pengawasan Penebangan Kayu Jati ...	103
Lampiran 5. Keserakahan Kolonial pada Hasil Hutan dan Perkebunan	104
Lampiran 6. Kepemilikan Tanah	105
Lampiran 7. Upah Pekerja Hutan dan Hewan Ternak Tahun 1861	106
Lampiran 8. Cara Penebangan Kayu1	107
Lampiran 9. Pembagian Kayu setelah ditebang.....	108
Lampiran 10. Cara Pengangkutan Kayu Jati Hasil Penebangan.....	109
Lampiran 11. Jenis Kayu Jati Berdasarkan Ukuran.....	110
Lampiran 12. Penanaman Kayu Jati melalui Benih/Biji Jati.....	111
Lampiran 13. Pemeliharaan Pohon Jati Muda.....	112
Lampiran 14. Penghapusan Sistem <i>Blandongdiensten</i>	113
Lampiran 15. Pembagian Kepala dan Pengawas Hutan Jati di Rembang.....	114
Lampiran 16. Keputusan Komisaris Jenderal Hindia Belanda berisi Ketentuan Pembayaran, Kewajiban, dan Pembagian Kegiatan Pekerja Hutan 1819.....	115
Lampiran 17. Peraturan tentang Kebijakan Administrasi Dalam Negeri dan Keuangan.....	118
Lampiran 18. Kesengsaraan Petani akibat Berlakunya Sistem <i>Blandongdiensten</i>	125

Lampiran 19. Penanggung Jawab Umum Kehutanan diserahkan kepada Direksi Hasil-Hasil Bumi dan Gudang Sipil	127
Lampiran 20. Penebangan Kayu Jati yang Disesuaikan dengan Permintaan.....	128
Lampiran 21. Penebangan Kayu di Hutan Pemerintah dibuat Bersyarat dengan Izin dari Pemerintah.....	129
Lampiran 22. Kebutuhan Kayu Jati untuk Pembangunan Pabrik-Pabrik	130
Lampiran 23. Kerugian Hewan Ternak yang Disewakan untuk Kegiatan Eksploitasi Hutan Jati.....	131
Lampiran 24. Jumlah Hewan Ternak Milik Penduduk yang Disewakan	132
Lampiran 25. Kontrak Penebangan Perusahaan Swasta	134
Lampiran 24. Pembentukan Reglemen Pemangkuan dan Eksploitasi Hutan di Jawa dan Madura.....	135